

## MENGEMBANGKAN WAWASAN KEUNGGULAN PENDIDIKAN DI SUMATERA BARAT

dr. H. FASLI JALAL, Ph. D

*Dirjen PLS dan Pemuda Depdiknas, Ketua Umum Gebu Minang*

### PENDAHULUAN

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) dibangun oleh beberapa pilar, yang terpenting diantaranya adalah pendidikan. Semakin terdidik suatu masyarakat semakin tinggi potensi untuk memiliki SDM yang lebih berkualitas. Selanjutnya, semakin tinggi kualitas SDM semakin besar kesempatan untuk memperoleh kesejahteraan yang lebih baik. Kuatnya kaitan antara pendidikan dengan SDM dalam mengukur keberhasilan pembangunan SDM suatu negara diperlihatkan oleh *United Nation Development Program* (UNDP). Badan dunia ini telah menetapkan pendidikan masyarakat di suatu negara sebagai salah satu indikator penting untuk menentukan peringkat SDM negara tersebut di antara negara-negara di dunia.

Menurut UNDP pada tahun 2000, dari 174 negara di dunia yang diurut dari peringkat 1 (satu) sebagai yang terbaik sampai peringkat 174 (seratus tujuh puluh empat) sebagai yang terburuk, Indonesia berada pada urutan ke-109. Peringkat Indonesia tersebut merupakan terendah di negara ASEAN setelah Myanmar (125), sementara negara ASEAN lainnya berada jauh di atas Indonesia, antara lain Singapura (24), Malaysia (61), Thailand (76), dan Filipina (77). Padahal sumber daya alam negara kita jauh lebih kaya dari negara-negara ASEAN lainnya, tetapi karena pendidikan penduduk negara kita masih tertinggal, maka kualitas SDM-nya juga masih rendah. Inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa peningkatan kesejahteraan di negara kita masih sulit diwujudkan. Kualitas SDM yang rendah karena tingkat pendidikan rendah akan menyebabkan daya saing tenaga kerja Indonesia menjadi rendah, baik di negara sendiri apalagi di luar negeri. Rendahnya pendidikan, menjadi salah satu penyebab mengapa negara kita lebih banyak "mengeksport" pembantu rumah tangga daripada tenaga profesional lainnya. Berbeda dengan negara Filipina, mereka berusaha keras untuk menyebarkan tenaga-tenaga terdidik yang profesional ke berbagai negara, dan apabila terpaksa mengirim pembantu rumah tangga, mereka berupaya mendidiknya terlebih dahulu, baik pendidikan formal maupun informal. Jangan heran apabila gaji pembantu rumah tangga yang berasal dari Philipina lebih tinggi daripada pembantu dari negara kita. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan dan keterampilan, terutama berbahasa Inggris yang mereka miliki, karena dipersiapkan secara lebih baik.

Akibat dari rendahnya kualitas SDM tersebut telah mempengaruhi kemampuan daya saing bangsa Indonesia. Sebagai suatu bangsa yang harus bersaing dalam era globalisasi, ternyata daya saing Indonesia juga belum memadai. Dari 48 negara yang diukur kemampuan daya saingnya oleh *International Institute for Management Development* tahun 2000, Indonesia menempati urutan ke-47, jauh di bawah negara-negara tetangga, seperti Singapura (2), Malaysia (27), Philipina (32), dan Thailand (34).

Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM atau HDI (*Human Development Indeks*) dan daya saing bangsa tersebut, jelas peranan pembangunan pendidikan amat penting. Pada awal abad XXI ini, dunia pendidikan di Indonesia menghadapi tiga tantangan besar.

Tantangan *Pertama*, sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. *Kedua*, untuk mengantisipasi era global, dunia pendidikan dituntut mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. *Ketiga*, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan/keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Pada saat ini pendidikan nasional juga masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang menonjol yaitu: (1) masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan; (2) masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan; dan (3) masih lemahnya manajemen pendidikan, di samping belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan akademisi. Ketimpangan pemerataan pendidikan juga terjadi antar wilayah geografis yaitu antara perkotaan dan pedesaan, antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI), dan tingkat pendapatan penduduk ataupun antar gender.

Keberhasilan Indonesia menuntaskan wajib belajar 6 tahun (tingkat Sekolah Dasar), ternyata belum berhasil mengangkat tingkat pencapaian pendidikan anak Indonesia sejajar dengan negara tetangga. Angka partisipasi murni SLTP baru sekitar 60 persen dan angka putus sekolah dan mengulang kelas, jauh lebih mengkhawatirkan. Angka buta huruf masih sekitar 10 persen dari penduduk. Kemampuan membaca murid-murid SD kita juga terendah di kawasan ASEAN. Dari hasil observasinya di beberapa negara, Taufik Ismail mengatakan anak-anak Indonesia "rabun membaca dan lumpuh menulis".

Kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Hal tersebut tercermin, antara lain, dari hasil studi kemampuan membaca untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) yang dilaksanakan oleh organisasi *Internasional Educational Achievement (IEA)* yang menunjukkan bahwa siswa SD di Indonesia berada pada urutan ke-38 dari 39 negara peserta studi. Sementara untuk tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), studi untuk kemampuan Matematika siswa SLTP di Indonesia hanya berada pada urutan ke-34 dari 38 negara, dan untuk kemampuan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) hanya berada pada urutan ke-32 dari 38 negara peserta.

Telaah NEM tingkat SMU memperlihatkan bahwa anak-anak Indonesia mempunyai nilai NEM bidang sains (Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi) yang sangat rendah, yaitu rata-rata di bawah angka 5, dengan nilai terendah pada mata pelajaran Matematika.

Kondisi dan daya saing perguruan tinggi (PT) kita juga tidak menggembirakan. Pada laporan Asia Week Juli 2000, tidak satupun PT Indonesia yang berhasil mendapat peringkat di bawah 50. peringkat ini bahkan menurun untuk UGM dan ITB dibanding tahun sebelumnya (lihat Tabel 1 dan 2).

Tabel 1. Peringkat Universitas Terbaik di Asia Tahun 2000

Universitas	Peringkat 2000	Peringkat 1999
Kyoto University	2	1
University of Hong Kong	4	3
Seoul National University	3	4
National University of Singapore	6	5
Australian National University	13	8
Taiwan University	5	12
Jawaharlal Nehru University	41	40
University of Malaya	27	47
University of Philippines	32	48
Thammasat University	38	51
University of Indonesia	61	70
Gajah Mada University	68	67
Diponegoro University	73	77
Airlangga University	75	79

Tabel 2. Peringkat Perguruan Tinggi Sains dan Teknologi Terbaik di Asia Tahun 2000

Universitas	Peringkat 2000	Peringkat 1999
Korea Advanced Institute of Science & Technology	1	1
Pohang University of Science & Technology	2	2
Indian Institute of Technology, Bombay	3	6
Indian Institute of Technology, Delhi	4	4
Indian Institute of Technology, Madras	5	5
Tokyo Institute of Technology	6	3
Indian Institute of Technology, Kanpur	7	7
Indian Institute of Technology, Kharagpur	8	-
Nanyang Technology University	9	8
Muroran Institute of Technology	16	18
Huazhong University of Science & Technology	18	11
Institute of Technology Bandung	21	15
Queensland University of Technology	25	26
King Mongkut's Inst. of Technology Ladkrabang	27	25
Hohai University	39	35

Manajemen pendidikan nasional secara keseluruhan masih bersifat sentralistis sehingga kurang mendorong terjadinya demokratisasi dan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Manajemen pendidikan yang sentralisasi tersebut telah menyebabkan kebijakan yang seragam yang tidak dapat mengakomodasi perbedaan keragaman/kepentingan daerah/sekolah/peserta didik, mematikan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan, serta mendorong terjadinya pemborosan dan kebocoran alokasi anggaran pendidikan.

Gambaran suram mutu SDM nasional memang amat memprihatinkan. Bagaimana daya saing SDM di Sumatera Barat di bandingkan dengan propinsi lain di Sumatera dan di Indonesia? Potret SDM Sumatera Barat yang digambarkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 1990 cukup menggembirakan. Dari 8 (delapan) propinsi di Sumatera, Sumatera Barat memiliki SDM peringkat terbaik ke-3 (ketiga) dengan skor 65,7 dan merupakan peringkat ke-7 (ketujuh) di tingkat nasional.

Namun mutu SDM yang cukup baik tahun 1990 itu ternyata tidak dapat kita pertahankan. Dari waktu ke waktu ada kecenderungan kualitas SDM di Sumatera Barat menurun, sementara beberapa propinsi lainnya justru meningkat. Data tahun 1996 menunjukkan kualitas SDM propinsi Sumatera Barat turun ke peringkat ke-5 dari 8 (delapan) propinsi di Sumatera, dan peringkat ke-11 (kesebelas) di tingkat nasional. Posisi Sumatera Barat tersebut, lebih jelek dari propinsi Jambi (peringkat ke-4 di Sumatera), dan D.I. Aceh (peringkat ke-3 di Sumatera). Padahal peringkat kualitas SDM propinsi Jambi dan D.I. Aceh pada tahun 1990 berada jauh di bawah Sumatera Barat, yaitu masing-masing peringkat 5 (lima) dan 7 (tujuh) di Sumatera, serta peringkat 9 (sembilan) dan 18 (delapan belas) secara nasional.

Data HDI Nasional tahun 1999 menunjukkan adanya peningkatan HDI Sumatera Barat dari peringkat 11 pada tahun 1996 menjadi peringkat 8 pada tahun 1999. Hal ini sudah merupakan suatu hal yang menggembirakan meskipun belum mampu melampaui Riau (5) dan Sumatera Utara (7).

Padahal kalau diperhatikan berbagai indikator pendidikan yang ada, terutama yang berhubungan dengan akses atau partisipasi sekolah, keadaan pendidikan di Sumatera Barat relatif memadai. Angka melek huruf (95,5%) sudah di atas dari rata-rata nasional. Selain itu angka partisipasi murni dijenjang SD sudah melebihi 95%. Angka partisipasi di jenjang SLTP/MTs juga sudah memadai karena berada di atas rata-rata nasional, dan sudah jauh lebih baik dari propinsi-propinsi di Sumatera. Yang menjadi keprihatinan kita adalah kualitas atau mutu pendidikan di Sumatera Barat. Keprihatinan ini didasarkan pada angka-angka NEM (Nilai Ebtanas Murni) murid-murid Sumatera Barat dibandingkan dengan propinsi lain di Indonesia.

Berdasarkan Laporan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, daya saing sekolah-sekolah di Sumatera Barat relatif rendah. Data tahun 1996/1997 menunjukkan, di tingkat SLTP, dari 60 SLTP dengan NEM paling baik di Indonesia, tidak satupun berasal dari Sumatera Barat. Sedangkan dari 1.276 SLTP dengan kualifikasi baik di seluruh Indonesia, hanya 3 (tiga) dari Sumatera Barat. Sedangkan D.I. Aceh menyumbang 64 sekolah, Sumatera Utara 51 sekolah, dan Riau 11 sekolah. Janganlah dibandingkan dengan Jawa Timur yang menyumbang 307 sekolah atau Jawa Tengah yang mempunyai sekolah baik 246 buah.

Ditingkat SMU, dari 10 (sepuluh) SMU dengan kualifikasi baik sekali berdasarkan Ebtanas SMU/MA tahun 1997/1998 bidang IPA, tidak satupun SMU Sumatera Barat yang masuk dalam kategori tersebut. Padahal SMU propinsi tetangga Sumatera Barat, yaitu Sumatera Utara dan D.I. Aceh termasuk salah satu dari 10 (sepuluh) SMU baik sekali tersebut. Sementara itu dari 199 (seratus sembilan puluh sembilan) SMU dengan klasifikasi baik berdasarkan Ebtanas SMU/MA tahun 1997/1998 bidang IPA, 9 SMU Sumatera Barat yang dapat digolongkan dalam katagori ini suatu prestasi yang memadai.

Hal ini berarti 4,5% dari seluruh SMU kualifikasi baik yang ada diseluruh Indonesia. Untuk mata pelajaran IPS dan Bahasa keadaan ini tidak lebih baik.

Persoalan ini yang dihadapi oleh pendidikan Sumatera Barat adalah partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan. Dengan menggunakan jumlah sekolah-sekolah swasta sebagai indikator partisipasi masyarakat dalam pendidikan, maka gambaran partisipasi masyarakat dalam pendidikan di Sumatera Barat juga memprihatinkan. Di tingkat SLTP partisipasi masyarakat paling rendah diantara propinsi di Sumatera dan bahkan di seluruh Indonesia. Jumlah SLTP yang dikelola oleh swasta di Sumatera Barat adalah 75 buah (16,82%), sementara di Sumatera Utara, Riau, dan Jambi masing-masing 1.053 buah (61,80%), 194 buah (38,42%), dan Jambi 91 buah (29,07%). Keadaan di tingkat SLTA juga tidak terlalu menggembirakan, meskipun jumlah dan persentasenya lebih tinggi dari SLTP, tetapi dibandingkan dengan tetangga lain, Sumatera Barat masih ketinggalan. SLTA swasta di Sumatera Barat sebanyak 158 buah (51,13%) secara prosentase lebih sedikit apabila dibandingkan dengan propinsi Sumatera Utara, Riau, dan Jambi, masing-masing yaitu sebanyak 943 buah (80,12%), 125 buah (53,42%), dan 88 buah (53,99%).

Gambaran tentang rendahnya jumlah sekolah swasta di Sumatera Barat yang dibandingkan dengan propinsi lain, dan yang dibandingkan dengan sekolah negeri di Sumatera Barat, dapat merupakan gambaran dari rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan di Sumatera Barat. Hal ini berarti sebahagian besar beban pendidikan di Sumatera Barat tergantung kepada pemerintah, sementara masyarakat sudah semakin menurun keterlibatannya dalam pembangunan dan pengelolaan sekolah. Keadaan ini sangat berbeda pada saat awal-awal kemerdekaan, dimana pendirian dan pengelolaan sekolah-sekolah di Sumatera Barat umumnya melalui partisipasi masyarakat. Dan perlu diingat, bahwa kepeloporan tokoh-tokoh dari Sumatera Barat sangat menonjol pada permulaan kemerdekaan Indonesia, dan dari para tokoh tersebut berasal dari sekolah-sekolah *partikelir* yang didirikan atas partisipasi masyarakat.

Untuk meningkatkan SDM penduduk Sumatera Barat, tiada lain kecuali dengan meningkatkan mutu pendidikan yang berbasiskan kepada dua pilar utama yaitu dengan memadukan pendekatan peran serta masyarakat (*Community-based*) dengan pendekatan keunggulan manajemen sekolah (*School-Based Manajemen*). Kedua sistem akan saling memperkaya sehingga akan melahirkan intelektual Sumatera Barat masa depan yang tidak saja menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi secara matang tetapi juga memiliki kepedulian terhadap masyarakat secara luas dan tulus ikhlas.

Untuk memajukan pendidikan dan peningkatan SDM Sumatera Barat, perlu suatu program nyata yang dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan segenap komponen masyarakat Sumatera Barat serta pada perantau dari Ranah Minang. Melalui makalah ini disampaikan beberapa pandangan dalam bentuk kegiatan nyata yang tujuannya untuk mengembangkan wawasan keunggulan pendidikan khususnya SLTA Sumatera Barat. Pemilihan tingkat pendidikan SLTA ini didasarkan karena SLTA merupakan fase kritis untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Tanpa meninggalkan perhatian kepada sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama, dengan adanya peningkatan kualitas yang lebih tinggi pada tingkat SLTA, maka akan semakin banyak para pelajar Sumatera Barat yang memenangkan persaingan untuk dapat menjadi mahasiswa di perguruan-perguruan tinggi yang memiliki kompetensi tinggi di tanah air.

Mudah-mudahan dapat direalisasikan dan bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Barat khususnya dan bagi bangsa Indonesia secara umum.

## KEGIATAN

### A. Pemberian Beasiswa bagi Siswa yang Berprestasi dari Keluarga yang Kurang Mampu

#### Latar Belakang

Pendidikan bermutu akan diperoleh secara optimal apabila didukung oleh faktor ekonomi dan fasilitas penunjang lainnya. Tidak sedikit siswa-siswa yang secara intelektual cerdas tetapi karena keterbatasan ekonomi, sehingga terkendala untuk berprestasi secara optimal, bahkan tidak jarang terpaksa putus. Kenyataan ini tidak saja pada tingkat Sekolah Dasar, tetapi juga terjadi pada tingkat Sekolah Menengah. Berbagai informasi menunjukkan tingkat putus sekolah pada perguruan tinggi yang disebabkan oleh keterbatasan ekonomi juga cukup tinggi. Hal ini dapat dipahami karena biaya untuk melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi jauh lebih besar daripada pendidikan sebelumnya dan dari tahun ke tahun terjadi kecenderungan peningkatan biaya pendidikan di Perguruan tinggi.

Hal ini sangat memprihatinkan terutama bagi mereka yang secara kapasitas intelektual mampu berprestasi di perguruan tinggi tetapi karena keterbatasan ekonomi tidak memiliki kesempatan untuk menguji kemampuannya. Kalau ini terjadi, kerugian tidak saja menimpa yang bersangkutan, tetapi juga menimpa daerah dari mana yang bersangkutan berasal bahkan juga merugikan bangsa dan negara ini.

Untuk daerah Sumatera Barat kita tentu tidak menginginkan “anak kemenakan” kita yang dianugerahi kapasitas intelektual yang membanggakan tidak dapat mengembangkan dirinya dalam pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi. Kepedulian terhadap mereka pertama dan utama sekali tentu dari kita sendiri masyarakat Sumatera Barat baik yang berada di rantau maupun di kampung halaman dan akan sulit bagi mereka memperoleh kepedulian dari pihak lain kalau kita sendiri menelantarkan anak kemenakan kita yang memiliki potensi tersebut.

Sehubungan hal tersebut perlu dilakukan suatu upaya untuk memberikan kesempatan kepada anak Sumatera Barat secara khusus terutama mereka yang secara ekonomi terbatas untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan secara optimal sesuai keunggulan yang dimilikinya. Kegiatan ini diharapkan dapat menemukan bibit-bibit unggul dari Sumatera Barat yang tidak saja mampu secara ilmu pengetahuan, tetapi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kemanusiaan dan tentunya memiliki dasar agama yang kuat sebagai insan yang nantinya diharapkan bermanfaat bagi masyarakat banyak.

#### Tujuan

- Mencari/menemukan anak-anak yang potensial berprestasi tetapi secara ekonomi kurang mampu.
- Membuat “*bench-mark*” prestasi pendidikan untuk wawasan keunggulan bagi siswa.

- Memberikan penghargaan baik finansial dan sosial kepada anak-anak yang berprestasi menonjol.
- Mendorong sekolah (kepala sekolah, guru, orang tua/wali murid) untuk memacu siswa berprestasi dan memfasilitasi proses mencapai keunggulan tersebut.
- Mendorong masyarakat baik di kampung maupun di rantau untuk menghargai prestasi pendidikan dan berpartisipasi dalam mendorong siswa meraih keunggulan/prestasi pendidikan tersebut.
- Meningkatkan mutu, efisiensi dan efektifitas proses belajar mengajar di sekolah-sekolah Sumatera Barat.
- Meningkatkan kemitraan antara lembaga pendidikan tenaga keguruan dengan Pemda, sekolah-sekolah dan masyarakat.

### Proses

- Pemanduan (*talent scouting*) anak berprestasi dimulai pada awal tahun ke II SLTA (kelas 2).
- Selama 3 – 6 bulan, direview semua dokumen tentang prestasi anak yang diunggulkan sebagai calon di tingkat sekolah. Kemudian dibuat ranking 5 besar di tingkat sekolah.
- Peringkat 1 s/d 5 di tingkat sekolah diusulkan langsung ke panitia di Propinsi dengan tembusan kepada Pemda masing-masing.
- Oleh panitia Propinsi (independen, kredibel, transparan, adil dan bertanggung jawab) dilakukan review secara menyeluruh dari semua calon yang masuk ke propinsi. Bila diperlukan dilakukan kunjungan lapangan. Surat-surat referensi dari guru, tokoh masyarakat, baik formal maupun informal akan diperhatikan.
- Akhirnya panitia propinsi menetapkan 20 siswa berprestasi di Sumatera Barat sebagai calon penerima Beasiswa.
- Beasiswa ditetapkan di akhir tahun/kelas 2 untuk diberikan pada siswa selama di kelas 3 untuk 20 orang.
- Selama di kelas 3, prestasi mereka dipantau dan kepada mereka diberikan dukungan untuk mengembangkan diri (ikut kursus Bahasa Inggris, Komputer, dana operasional internet, dll.).
- Kepada 10 siswa terbaik diantara mereka dijanjikan untuk dibiayai penuh selama 4 tahun bila mereka diterima di Universitas-Universitas yang ditetapkan/di jurusan-jurusan terpilih.
- Sejalan dengan itu untuk siswa yang memiliki prestasi tinggi tetapi dengan keadaan ekonomi keluarga yang memadai (melebihi batas ambang ekonomi yang ditetapkan) tetap akan mengikuti seleksi dan akan diberikan penghargaan khusus sebanding dengan prestasinya. Namun penghargaan itu tidak disertai dengan penyediaan Beasiswa. Diasumsikan siswa-siswa dari keluarga mampu ini akan dapat dibiayai sendiri oleh keluarga.

### Pengorganisasian

- ◆ Dibentuk suatu Yayasan “Pengembangan Pendidikan” untuk melaksanakan ide ini.
- ◆ Yayasan akan mengumpulkan dana dan memilih 9 – 11 orang yang akan duduk dalam komite Penentuan Penerima Beasiswa yang berkedudukan di Sumatera Barat.

- ◆ Untuk Dewan Penyantun Yayasan dapat melibatkan donatur-donatur dan tokoh-tokoh dari rantau. Sedangkan operasi pemilihan dan pemberian beasiswa beserta semua dukungan dilakukan di Sumatera Barat oleh tokoh-tokoh di Sumatera Barat.
- ◆ Didukung oleh suatu sekretariat yang profesional.

#### Kegiatan Pendukung

- ◆ Membuat database tentang profil murid berprestasi dan profil mutu SLTA di Sumatera Barat.
- ◆ Bekerjasama dengan UNP dan LPTK lainnya melakukan telaahan kritis tentang mutu/peringkat dari SLTA di Sumatera Barat.
- ◆ Bekerjasama dengan UNP dan LPTK lainnya menyusun program-program perbaikan mutu dari SLTA-SLTA yang relatif tertinggal untuk diusulkan pada Pemda dan masyarakat untuk ditingkatkan kinerjanya.
- ◆ Bekerjasama dengan UNP dan LPTK lainnya menganalisis kekuatan dari SLTA-SLTA yang murid-muridnya banyak yang berprestasi menonjol dan bersama-sama membuat program-program untuk meningkatkan "bench mark" mereka ke tingkat standar yang lebih tinggi, sehingga bisa bersaing secara regional atau internasional.

#### Pembiayaan

Beasiswa selama kelas III SLTA:

- ◆ Rp. 250.000/bulan/anak atau Rp. 3 juta/tahun/anak
- ◆ Sasaran 20 anak =  $20 \times \text{Rp. 3 juta} = \text{Rp. 60 juta/tahun}$

Biaya seleksi dan Sekretariat pendukung:

- ◆ Rp. 20 juta/tahun

Beasiswa Perguruan Tinggi selama 4 tahun:

- ◆ Biaya kuliah Rp. 5 juta/anak/tahun
- ◆ Biaya hidup Rp. 4 juta/anak/tahun
- ◆ Biaya Penunjang Rp. 1 juta/anak/tahun
- ◆ Sasaran 10 anak =  $10 \times \text{Rp. 10 juta} = \text{Rp. 100 juta/tahun}$

Tahapan pembiayaan:

- ◆ Tahun I = Rp. 80 juta
- ◆ Tahun II = Rp. 80 juta + Rp. 100 juta = Rp. 180 juta
- ◆ Tahun III = Rp. 80 juta + Rp. 100 juta + Rp. 100 juta = Rp. 280 juta
- ◆ Tahun IV = Rp. 80 juta + Rp. 100 juta + Rp. 100 juta + Rp. 100 juta = Rp. 380 juta
- ◆ Tahun V = Rp. 80 juta + Rp. 100 juta + Rp. 100 juta + Rp. 100 juta + Rp. 100 juta = Rp. 480 juta.

#### Catatan Tambahan:

Bila seleksi siswa yang berprestasi yang dilakukan di tingkat sekolah tersebut dapat menjaring siswa yang potensial, maka bila mereka tidak mendapatkan beasiswa dari "yayasan" (di tingkat propinsi), maka Pemda dapat memberikan beasiswa (dari Pemda) bila mereka diterima di Perguruan Tinggi yang ditetapkan. Ikatan Keluarga Nagari di rantau, Ikatan Alumni SLTA tersebut, dan berbagai Yayasan dan pribadi-pribadi dapat menyediakan beasiswa bagi mereka yang berprestasi tetapi tidak beruntung mendapatkan dari yayasan di tingkat propinsi.

## B. Dukungan Peningkatan Mutu SLTA melalui Pemberian Dana Hibah Bersaing (*Competitive Matching Grant*)

### Latar Belakang

Peranan sekolah dalam meningkatkan mutu intelektualitas seorang siswa sudah tidak diragukan lagi. Makin bermutu berbagai proses belajar mengajar di sekolah, maka makin bermutu pula input yang diperoleh oleh siswa tersebut sebagai bekal untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Sebaliknya hal yang sama akan terjadi pada sekolah-sekolah dengan mutu yang rendah. Mutu sekolah ditentukan oleh pengajar, kurikulum, manajemen dan berbagai komponen lainnya yang berhubungan langsung dan tidak langsung dengan proses belajar mengajar. Mutu ini akan bisa terus meningkat apabila berbagai input yang dibutuhkan dapat dipenuhi dan ada kesadaran yang tinggi dari masyarakat sekolah, baik kepala sekolah, guru, orang tua/wali murid dan siswa untuk menjalankan proses belajar mengajar baik kurikuler maupun ekstra kurikuler dengan baik.

Mutu proses belajar mengajar di sekolah secara manajerial dan psikososial tentu akan sangat mudah ditemukan oleh komponen sekolah (kepala sekolah, guru, orang tua/wali murid dan siswa). Bahkan identifikasi terhadap masalah proses belajar mengajar bila lebih mudah dikenali oleh komponen sekolah daripada para peneliti sekalipun. Karena itu untuk membuat suatu program peningkatan mutu serta menentukan prioritas program yang paling tepat untuk satu sekolah, dimulai dari identifikasi masalah, sekaligus upaya mengatasi permasalahan, serta tata cara pelaksanaan program peningkatan mutu sekolah yang dilakukan oleh komponen sekolah sangat penting.

Berdasarkan hal tersebut di atas, melalui kegiatan ini direncanakan memberikan pembiayaan untuk mendukung peningkatan mutu SLTA melalui pemberian dana hibah bersaing. Dengan memperoleh dana tersebut sekolah dapat melakukan serangkaian upaya yang akan meningkatkan mutu proses belajar mengajar di sekolahnya sehingga memberikan kekayaan intelektual yang tidak sedikit bagi siswa-siswanya sekaligus cara-cara seperti yang diterapkan oleh sekolah yang memperoleh hibah bersaing tersebut di atas.

### Tujuan

- ◆ Merangsang SLTA untuk melaksanakan evaluasi diri dan menetapkan sasaran peningkatan mutu yang akan dicapainya.
- ◆ Memfasilitasi SLTA-SLTA untuk membuat program-program peningkatan mutu berdasarkan hasil evaluasi diri.
- ◆ Menyediakan dana hibah (*Competitive Matching Grant*) sebagai dana pendamping upaya-upaya peningkatan mutu yang dilakukan sekolah.
- ◆ Meningkatkan keterbukaan sekolah terhadap keterlibatan masyarakat dalam upaya-upaya peningkatan mutu.
- ◆ Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya-upaya sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- ◆ Mendukung kemandirian sekolah dan kemampuan sekolah dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah (*school based management*).

## Proses

- a. Di bawah Yayasan yang sama dibentuk Komite Peningkatan mutu sekolah dengan anggota 5 – 7 orang, yang terdiri dari ahli pendidikan, wakil LSM, tokoh masyarakat/agama dan birokrat.
- b. Komite mempersiapkan Prosedur Standar yang harus diikuti sekolah bila ingin mendapatkan bantuan hibah bersaing ini.
- c. Komite melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah tentang prosedur dan tentang kemungkinan mendapatkan hibah bersaing untuk peningkatan mutu.
- d. Masing-masing sekolah melakukan evaluasi diri sesuai dengan prosedur dan format yang telah ditetapkan komite.
- e. Berdasarkan hasil-hasil evaluasi diri tersebut, sekolah menyusun proposal upaya peningkatan mutu, yang dibahas bersama-sama dengan orang tua/wali murid dan tokoh masyarakat setempat.
- f. Sekolah menyusun rencana biaya untuk upaya peningkatan mutu tersebut.
- g. Sekolah menggali sumber-sumber biaya yang bisa diperoleh di tingkat sekolah (terutama dari orang tua/wali murid dan sumbangan masyarakat).
- h. Sekolah mengusulkan tambahan biaya yang dibutuhkan komite di samping biaya yang berhasil dikumpulkan di tingkat sekolah.
- i. Proposal tersebut dikirim oleh sekolah kepada komite di propinsi dengan tembusan langsung kepada Pemda masing-masing.
- j. Komite melakukan verifikasi, analisis, dan penentuan peringkat dari kualitas proposal-proposal yang layak untuk memperoleh bantuan.
- k. Lima proposal terbaik akan diberikan Rp. 50 juta/tahun selama 3 tahun berturut-turut. Kelanjutan dukungan dana tahun kedua dan ketiga akan ditentukan oleh evaluasi atas kualitas pelaksanaan tahun sebelumnya.

## Pembiayaan

### Tahun I

- ◆ 5 sekolah × Rp. 50 juta = Rp. 250 juta
- ◆ Biaya penunjang Rp. 50 juta
- ◆ Jumlah keseluruhan Rp. 300 juta

### Tahun II

- ◆ Rp. 250 juta + Rp. 300 juta = Rp. 550 juta

### Tahun III

- ◆ Rp. 250 juta + Rp. 250 juta + Rp. 300 juta = Rp. 800 juta

## Manfaat

- ◆ Semua sekolah akan termotivasi untuk melakukan evaluasi diri.
- ◆ Dalam proses evaluasi diri ini, sekolah juga akan terbuka terhadap masukan dari orang tua/wali murid dan tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan sekolah.
- ◆ Sekolah akan berupaya memfokuskan diri pada kegiatan-kegiatan prioritas untuk dapat meningkatkan mutu sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
- ◆ Sekolah akan berupaya meningkatkan peran serta pihak yang terkait dalam sekolah (*Stakeholders*) untuk bersama-sama mensukseskan upaya-upaya peningkatan mutu tersebut.

- ◆ Orang tua/wali, tokoh masyarakat (termasuk perantau) dan Pemda akan memperoleh beragam proposal dari sekolah-sekolah dalam upaya meningkatkan mutu, sehingga memudahkan mereka untuk berperan serta.
- ◆ LPTK akan dapat memberikan bantuan teknis mereka kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan tetapi sekaligus juga LPTK akan makin memahami masalah-masalah pendidikan di lapangan yang dihadapi sekolah dan masyarakat, sehingga kurikulum, agenda riset, dan program pengabdian masyarakat dari LPTK dapat ditingkatkan secara terus menerus.

Catatan Tambahan:

Seandainya sekolah-sekolah tersebut mampu melakukan SWOT bagi upaya peningkatan mutu dan berhasil menyusun program yang mungkin atau layak untuk dilaksanakan, tetapi tidak berhasil mendapatkan dana hibah bersaing dari yayasan maka Ikatan Keluarga Nagari, atau Ikatan Keluarga tingkat Kabupaten, serta Pemda Kabupaten/Kota, maupun alumni dapat memberikan dukungan langsung kepada sekolah-sekolah tersebut, sehingga jumlah sekolah yang akan berupaya mengevaluasi diri dan menyusun program peningkatan mutu dan relevansi pendidikannya semakin banyak yang bisa terbantu.

**C. Pemberian Dana Peningkatan Mutu Proses Belajar Mengajar di Sekolah bagi Guru-guru (untuk tahap pertama dilakukan untuk mata pelajaran Matematika dan Bahasa Inggris)**

**Latar Belakang**

Mutu pendidikan terutama ditentukan oleh proses belajar mengajar di kelas, dalam hal ini peran terpenting ditentukan oleh guru. Proses belajar mengajar akan baik apabila pendidikan guru sesuai dengan mata pelajaran yang ditekuni dan kualifikasi yang dimiliki juga sesuai dengan jenjang pendidikan yang diajar. Disamping itu pengalaman lapangan, dukungan belajar mengajar, baik dukungan administrasi, manajerial, dan profesionalisme amat menentukan mutu proses belajar mengajar di sekolah. Selama ini cukup banyak hambatan yang dihadapi guru dalam mengupayakan proses belajar mengajar yang bermutu. Hal ini sebagian disebabkan oleh kurang tersedianya dukungan dana operasional terhadap guru yang dapat langsung digunakan guru untuk membiayai upaya-upaya peningkatan mutu proses belajar mengajar di kelas dan di luar kelas. Hal ini dapat dimengerti karena dana operasional sekolah di luar gaji guru sangat minim termasuk dana bantuan dari BP3 untuk sekolah. Akibat kekurangan dana operasional pendidikan tersebut, guru yang banyak ide untuk peningkatan belajar mengajar sering frustrasi sehingga akhirnya cenderung melaksanakan tugas secara rutinitas saja.

Hal ini diperberat oleh kurikulum yang relatif kaku dan berat serta sistem evaluasi yang tidak seluruhnya menggambarkan prestasi anak. Selain itu dukungan profesional kepada guru tidak cukup tersedia, yang seharusnya diberikan oleh pengawas pendidikan yang kompeten, organisasi profesi guru mata pelajaran, dan/atau dukungan dari LPTK.

Dengan latar belakang demikian, maka apabila kepada guru-guru yang inovatif, berdedikasi tinggi dan mempunyai komitmen yang besar untuk meningkatkan proses belajar mengajar dapat diberikan dukungan, maka akan diperoleh guru-guru yang

memiliki kemampuan yang membanggakan secara profesional dan sekaligus dapat meningkatkan kualitas pengabdian secara total pada sekolah.

### **Tujuan**

- ◆ Menemukan guru-guru yang potensial dan mempunyai konsep-konsep peningkatan mutu proses belajar mengajar di kelas dan di sekolah.
- ◆ Memfasilitasi guru-guru potensial untuk melakukan evaluasi diri dalam menjalankan proses belajar mengajarnya dan menemukan langkah-langkah atau program peningkatan mutu, efisiensi dan efektifitas proses belajar mengajar di kelas/sekolah berdasarkan prioritas sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
- ◆ Meningkatkan dukungan kepala sekolah dan tenaga pendukung lainnya kepada guru dalam upaya meningkatkan proses belajar mengajar di kelas.
- ◆ Meningkatkan partisipasi dari orang tua/wali murid dan tokoh masyarakat dalam mendukung upaya guru dalam peningkatan mutu proses belajar mengajar di kelas.
- ◆ Meningkatkan kualitas dan kepercayaan diri guru dalam mengajar.
- ◆ Meningkatkan kegairahan murid untuk belajar yang akhirnya meningkatkan mutu pendidikan di kelas dan sekolah.
- ◆ Meningkatkan penghargaan masyarakat pada guru dan profesi pendidikan.

### **Proses**

- ◆ Pembentukan komite peningkatan mutu proses belajar mengajar guru dengan anggota 5 – 7 orang, yang terdiri dari ahli pendidikan, wakil LSM, tokoh masyarakat/agama, dan birokrat.
- ◆ Komite mempersiapkan prosedur standar yang harus diikuti oleh guru bila ingin mendapatkan bantuan dana peningkatan mutu proses belajar mengajar guru.
- ◆ Komite melakukan sosialisasi kepada sekolah dan guru-guru tentang prosedur serta cara-cara mendapatkan dana peningkatan mutu proses belajar mengajar guru.
- ◆ Masing-masing guru melakukan evaluasi diri sesuai dengan proses dan format yang telah ditetapkan komite.
- ◆ Berdasarkan hasil-hasil evaluasi diri tersebut, guru menyusun proposal upaya peningkatan proses belajar mengajar guru yang dibahas bersama-sama dengan kepala sekolah, guru-guru terkait lainnya dan orang tua/wali murid.
- ◆ Guru dan sekolah menyusun rencana biaya untuk upaya peningkatan mutu proses belajar mengajar guru tersebut.
- ◆ Sekolah menggali sumber-sumber biaya yang dapat diperoleh di tingkat sekolah (termasuk dari orang tua/wali murid dan sumbangan masyarakat).
- ◆ Kekurangan dana setelah partisipasi dari pihak terkait diusulkan kepada komite oleh guru dengan sepengetahuan kepala sekolah.
- ◆ Komite melakukan verifikasi, analisis dan peringkatan dari kualitas proposal yang layak untuk memperoleh bantuan.
- ◆ 10 proposal terbaik akan diberikan biaya sebesar Rp. 10 juta per tahun selama 3 tahun berturut-turut. Kelanjutan dukungan dana tahun kedua dan ketiga akan ditentukan oleh kualitas pelaksanaan tahun sebelumnya.

## Pembiayaan

### Tahun I

- ♦ 10 orang guru × Rp. 10 juta = Rp. 100 juta
- ♦ Biaya penunjang Rp. 20 juta
- ♦ Jumlah keseluruhan Rp. 120 juta

### Tahun II

- ♦ Rp. 100 juta + Rp. 120 juta = Rp. 220 juta

### Tahun III

- ♦ Rp. 100 juta + 100 juta + Rp. 120 juta = Rp. 320 juta

## Manfaat

- ♦ Mendukung guru yang inovatif dan berdedikasi untuk mengembangkan proses belajar mengajar sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan.
- ♦ Memfasilitasi guru dalam melakukan evaluasi diri sehingga dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan proses belajar mengajar saat ini dan mampu menyusun langkah-langkah kongkrit dan prioritas penanggulangannya.
- ♦ Mendukung sekolah untuk dapat mengetahui hal-hal yang diperlukan guru dalam meningkatkan proses belajar mengajar.
- ♦ Membuka peluang peningkatan peran serta orang tua/wali dalam mendukung guru meningkatkan pembelajaran siswa.
- ♦ Meningkatkan kebanggaan guru akan profesinya.
- ♦ Meningkatkan kemitraan antara LPTK dengan sekolah.
- ♦ Meningkatkan peran serta orang tua/wali murid, masyarakat dan Pemda dalam mendukung guru.
- ♦ Meningkatkan kegairahan murid dalam belajar.

### Catatan Tambahan:

Siapa saja yang bersimpati kepada profesi guru dan mempunyai komitmen untuk meningkatkan dedikasi, profesionalisme, penghargaan pada guru yang inovatif dan berprestasi, dapat memberikan bantuan langsung kepada guru-guru tersebut, yang karena jumlah terbatas tidak mendapatkan dukungan dari komite atau “yayasan”.

## D. Dukungan Peningkatan Pengembangan Bahasa Asing (Bahasa Inggris) di SLTA melalui Pemberian Dana Hibah Bersaing (*Competitive Matching Grant*)

### Latar Belakang

Tidak dapat kita pungkiri, bahwa bahasa Inggris telah menjadi bahasa perantara dalam pergaulan internasional. Hal yang sama juga terjadi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara internasional tidak dapat lepas dari penguasaan bahasa Inggris. Hal ini mendorong kita untuk meningkatkan penguasaan bahasa ini secara lebih dalam dan luas bagi anak didik, terutama pada tingkat SLTA di Sumatera Barat, sebagai bekal bagi mereka untuk bersaing di pendidikan lebih lanjut, baik di dalam maupun di luar negeri.

Mengingat luasnya penggunaan bahasa Inggris dan perlunya penguasaan bahasa ini bagi setiap siswa, baik yang akan terjun ke pendidikan tinggi maupun ke dunia kerja, maka perlu suatu program yang dapat mensosialisasikan penggunaan bahasa ini

secara lebih luas. Mengingat beragamnya karakteristik masing-masing sekolah dan masing-masing daerah, maka bentuk program yang paling tepat dilakukan adalah dengan memberikan kesempatan pada sekolah dan daerah untuk mengembangkan berbagai kegiatan inovatif di tingkat sekolah yang akan mempercepat penguasaan dan pendalaman kemampuan bahasa Inggris siswa.

Melalui kegiatan ini akan diberikan kesempatan yang luas bagi sekolah untuk mengembangkan bahasa Inggris di sekolahnya sehingga menciptakan intelektual-intelektual muda Sumatera Barat yang mampu bersaing dengan tamatan SLTA serupa dari propinsi-propinsi lainnya dan siap untuk memasuki persaingan global. Untuk mencapai maksud tersebut sekolah memiliki kebebasan untuk membuat program yang dapat dibiayai oleh kegiatan tersebut di atas.

### **Tujuan**

- ◆ Merangsang SLTA untuk merancang program peningkatan mutu proses belajar mengajar bahasa Inggris di sekolah.
- ◆ Menyediakan dana hibah/pendamping sebagai upaya untuk melaksanakan program belajar mengajar bahasa Inggris yang sudah dirancang.
- ◆ Mendorong murid dan guru untuk menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pendamping di sekolah dalam proses belajar mengajar.
- ◆ Mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi era globalisasi yang salah satunya dicirikan oleh penguasaan dalam bahasa Inggris.
- ◆ Meningkatkan peran serta orang tua/wali, masyarakat dan sekolah dalam memanfaatkan ilmu dan teknologi, terutama yang berbasis bahasa Inggris.

### **Proses**

- ◆ Di bawah Yayasan yang sama dibentuk komite pengembangan bahasa asing (bahasa Inggris) dengan anggota 5 – 7 orang yang terdiri dari wakil perguruan tinggi, praktisi bahasa Inggris, dan wakil LSM/tokoh masyarakat.
  - ◆ Komite mempersiapkan Prosedur Standar yang harus diikuti sekolah bila ingin mendapatkan bantuan hibah bersaing ini.
  - ◆ Komite melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah tentang prosedur dan tentang kemungkinan mendapatkan hibah bersaing untuk pengembangan bahasa Inggris.
  - ◆ Sekolah menyusun proposal pengembangan bahasa Inggris di tingkat sekolah, yang dibahas bersama-sama dengan orang tua/wali murid dan tokoh masyarakat setempat.
  - ◆ Sekolah menyusun rencana biaya untuk pengembangan bahasa Inggris tersebut.
  - ◆ Sekolah menggali sumber-sumber biaya yang bisa diperoleh di tingkat sekolah (terutama dari orang tua/wali murid dan sumbangan masyarakat).
  - ◆ Sekolah mengusulkan tambahan biaya yang dibutuhkan komite.
  - ◆ Proposal tersebut dikirim oleh sekolah kepada komite di propinsi dengan tembusan langsung kepada Pemda masing-masing.
  - ◆ Komite melakukan verifikasi, analisis, dan peringkatan dari kualitas proposal-proposal yang layak untuk memperoleh bantuan.
- B. Tiga proposal terbaik akan diberikan Rp. 50 juta/tahun selama 3 tahun berturut-turut. Kelanjutan dukungan dana tahun kedua dan ketiga akan ditentukan oleh kualitas pelaksanaan tahun sebelumnya.

## **Pembiayaan**

### **Tahun I**

- ◆ 3 sekolah × Rp. 25 juta = Rp. 75 juta
- ◆ Biaya penunjang Rp. 20 juta
- ◆ Jumlah keseluruhan Rp. 95 juta

### **Tahun II**

- ◆ Rp. 95 juta + Rp. 75 juta = Rp. 170 juta

### **Tahun III**

- ◆ Rp. 95 juta + Rp. 75 juta + Rp. 75 juta = Rp. 245 juta

## **Manfaat**

- ◆ Semua sekolah akan termotivasi untuk melakukan pengembangan program bahasa Inggris.
- ◆ Para siswa akan berupaya untuk mempelajari dan menerapkan bahasa Inggris minimal dalam kehidupan di sekolah dan di kehidupan sehari-hari.
- ◆ Akan terbangun suatu komunikasi bahasa Inggris yang lebih mapan di sekolah sebagai dasar bagi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus memberikan bobot bagi kapasitas intelektual siswa di masa yang akan datang.
- ◆ Meningkatkan kerjasama antara LPTK dan praktisi bahasa Inggris lainnya dengan sekolah dan Pemda untuk meningkatkan mutu pendidikan bahasa Inggris.
- ◆ Mendorong dan meningkatkan percaya diri siswa untuk bersaing dengan siswa lain baik dari sekolah di Sumatera Barat maupun dengan sekolah di luar Sumatera Barat, terutama dalam bahasa Inggris dan penguasaan IPTEK lainnya.

## **E. Meningkatkan Kemitraan antara Ilmuwan Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Daerah dan Kelompok Usaha Kecil dan Menengah di Sumatera Barat**

### **Latar Belakang**

Di Sumatera Barat terdapat sekitar 133.000 unit usaha kecil (kerajinan, industri kecil, usaha rumah tangga, dll.) yang masing-masing mempekerjakan 5 – 20 tenaga atau lebih kurang 98% dari seluruh unit usaha yang ada. Untuk mengembangkan usahanya, mereka memerlukan akses terhadap permodalan dan informasi pasar, selain itu juga keahlian untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi yang dibutuhkan masyarakat dan keahlian pemasarannya. Hal ini dapat diperoleh melalui pembinaan hubungan baik yang telah dipunyai dan pengembangan hubungan baru dengan rekan wirausahawan dan rekan yang mempunyai keahlian yang diperlukan dalam pengembangan produk. Pengusaha kecil dan menengah kita ini, kadang-kadang mempunyai hubungan yang sangat terbatas, sehingga tidak sedikit mereka yang menjadi sapi perahan oleh rekan bisnisnya, seolah-olah hanya rekan tersebutlah yang dapat menyalurkan hasil produksinya. Biasanya pengusaha tersebut tidak menyadari telah menjadi sapi perahan, bahkan merasa sangat ditolong karena tidak perlu mengeluarkan tenaga dan pikiran dalam memasarkan produknya. Namun ada juga pengusaha kecil dan menengah yang berupaya sendiri memasarkan produknya. Biasanya mereka akan mengalami kesukaran, karena instansi atau pasar sudah dikuasai oleh orang-orang tertentu.

Untuk dapat selalu bersaing di pasaran, produk yang dihasilkan harus mempunyai kelebihan dibandingkan dengan produk pengusaha lain. Hal ini memerlukan penguasaan teknologi yang dapat digunakan untuk menyempurnakan kualitas produk. Karena keterbatasan pengetahuan, sebahagian besar pengusaha kecil dan menengah tidak dapat bersaing dan akan tergusur dari percaturan atau terdesak ke daerah-daerah yang jauh dari kota.

Dilain pihak, perguruan tinggi memiliki pakar-pakar dari berbagai bidang IPTEK yang dalam kegiatan di luar kampusnya justru banyak membantu perusahaan atau industri besar. Industri kecil dan menengah bukannya tidak diperhatikan, namun biasanya waktu yang tersedia banyak tersedot untuk membantu industri besar. Ada pula pakar yang merasa gamang untuk membantu para pengusaha, karena menyadari kekurangan akan hal-hal praktis dalam penerapan IPTEK yang dikuasainya ke dalam kegiatan usaha riil di lapangan.

Di Sumatera Barat saja sekarang ini ada sekitar 200 orang yang berpendidikan Doktor (S-3/Ph.D) di berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Sumatera Barat. Mereka terdiri dari ahli dengan bermacam-macam spesialisasi dan memiliki potensi besar untuk turut dalam pengembangan berbagai jenis usaha di Sumatera Barat. Dengan memanfaatkan para pakar tersebut, diharapkan produk-produk yang dihasilkan dari Sumatera Barat, lebih berkualitas sehingga mampu berkompetisi dengan produk dari propinsi lain, baik dalam skala regional, bahkan internasional.

Untuk meningkatkan Kemitraan antara Ilmuan Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Daerah dan Kelompok Usaha Kecil dan Menengah di Sumatera Barat diusulkan 2 (dua) kegiatan, yaitu:

- A. Membentuk Pusat Informasi Ilmuwan Sumatera Barat sesuai bidang keahliannya melalui internet (Minang net.Com) sebagai wahana memperkenalkan kemampuan dan keunggulan Ilmuwan dimaksud

### **Tujuan**

- ◆ Membangun database tentang profil lengkap dari Ilmuwan Perguruan Tinggi Sumatera Barat untuk dimasukkan ke dalam Minang net.Com.
- ◆ Mengembangkan Minang net.Com atau ".com-.com" sebagai mediator bagi Ilmuwan Sumatera Barat untuk menjelaskan ide-ide penelitian dan atau pengabdian masyarakatnya, sehingga proposal mereka diketahui oleh masyarakat luas, terutama masyarakat Minang di perantauan sehingga diharapkan dapat memancing dukungan dari berbagai pihak. Dukungan tersebut dapat berupa:
  - Buku-buku referensi atau artikel yang dapat memperkaya bahan rujukan/referensi untuk bidang penelitian dan atau pengabdian masyarakat mereka.
  - Memberi informasi tentang pihak-pihak lain yang dapat dihubungi yang mungkin dapat membantu pakar tersebut dalam mewujudkan ide-idenya.
  - Mencarikan kerjasama dengan lembaga atau perusahaan dari orang rantau.
  - Mengundang Ilmuwan untuk mempresentasikan idenya dalam forum seminar atau lokakarya yang relevan, baik di tingkat nasional dan regional maupun daerah/propinsi lain.

- Profil detail Ilmuwan dengan latar belakang studi dan bidang penelitian yang diminati dapat menjadi sumber informasi bagi orang rantau yang akan mencari konsultan untuk bidang-bidang tersebut atau mereka dapat "menjualkan" keahlian tersebut kepada pihak lain yang membutuhkan.

#### Proses

- ◆ Dibawah Yayasan yang sama melalui sekretariat yayasan dikumpulkan curriculum vitae lengkap dari seluruh Ilmuwan (Doktor/S-3/Ph.D) dari Perguruan Tinggi di Sumatera Barat.
- ◆ Dilakukan kerjasama dengan Minang net.Ccom untuk mengakses curriculum vitae dari berbagai dokumen pentingnya dalam situs tersendiri.
- ◆ Menyebarkan dan mempublikasikan materi tentang Ilmuwan Sumatera Barat ada di dalam Minang net.Com.
- ◆ Memfasilitasi berbagai kerjasama penelitian dan kerjasama ilmiah lainnya yang berhubungan dengan para Ilmuwan Sumatera Barat.

#### Pembiayaan

Administrasi termasuk transportasi, surat menyurat, akses komputer, dsb., sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per tahun. Sementara hardware komputer sudah ada di sekretariat.

#### Manfaat

- ◆ Semua Ilmuwan (Doktor/S-3/Ph.D) Sumatera Barat akan dapat didata sesuai kompetensi keilmuannya.
  - ◆ Membina hubungan kerjasama antara Ilmuwan Sumatera Barat dengan para perantau, pengusaha, dan pakar-pakar lainnya di seluruh dunia.
  - ◆ Memberikan akses yang lebih luas kepada Ilmuwan Sumatera Barat untuk mengembangkan diri dan ilmu yang dimiliki serta mempererat hubungan antara sesama Ilmuwan dari Sumatera Barat dan antara Ilmuwan Sumatera Barat dengan Ilmuwan Nasional dan Internasional.
- B. Merangsang Ilmuwan Perguruan Tinggi Sumatera Barat untuk meneliti hal-hal yang diperlukan pengusaha kecil dan menengah serta koperasi di Sumatera Barat dengan menyediakan dana hibah bersaing (*Competitive Research Grant*)

#### Tujuan

- Untuk mempertahankan dan meningkatkan ketajaman ilmiah dari Ilmuwan Perguruan Tinggi Sumatera Barat melalui upaya-upaya penelitian tentang berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.
- Membantu pengusaha kecil dan menengah serta koperasi dan pemerintah daerah dalam mencari jawaban terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi.
- Meningkatkan relevansi Ilmuwan Perguruan Tinggi Sumatera Barat dengan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.
- Meningkatkan komitmen kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Pemda dan pengusaha kecil dan menengah serta koperasi.

## Proses

- ◆ Di bawah Yayasan yang sama dibentuk komite penilaian proposal dengan anggota 5 – 7 orang yang terdiri dari wakil perguruan tinggi, kalangan profesi, dan wakil LSM/tokoh masyarakat.
- ◆ Komite mempersiapkan Prosedur Standar yang harus diikuti Ilmuwan bila ingin mendapatkan bantuan hibah bersaing ini.
- ◆ Komite melakukan sosialisasi kepada para Ilmuwan dan Perguruan Tinggi tentang prosedur kegiatan ini.
- ◆ Ilmuwan menyusun proposal sesuai permintaannya beserta dana yang dibutuhkan.
- ◆ Ilmuwan menggali sumber-sumber biaya yang mungkin bisa diperoleh.
- ◆ Proposal tersebut dikirim oleh Ilmuwan bersangkutan kepada komite di propinsi dengan diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi atau Dekan yang bersangkutan, tembusan langsung disampaikan kepada Pemda lokasi kegiatan.
- ◆ Komite melakukan verifikasi, analisis, dan peringkat dari kualitas proposal-proposal yang layak untuk memperoleh bantuan.
- ◆ 20 (dua puluh) proposal terbaik akan diberikan Rp. 20 juta/tahun selama 1 tahun dan dibolehkan untuk turut dalam pengajuan tahun berikutnya, baik melanjutkan kegiatan sebelumnya dan/atau membuat kegiatan baru.

## Pembiayaan

### Tahun I

- ◆ 20 proposal × Rp. 20 juta = Rp. 400 juta
- ◆ Biaya penunjang Rp. 20 juta
- ◆ Jumlah keseluruhan Rp. 420 juta

Tahun II : sama dengan tahun pertama (Rp. 420 juta)

Tahun III : sama dengan tahun kedua (Rp. 420 juta)

## Manfaat

Menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara Ilmuwan, pengusaha kecil dan menengah serta Pemda Kabupaten/Kota dan Propinsi secara harmonis dan berkesinambungan, demi kesejahteraan penduduk Sumatera Barat.

## PENUTUP

Seluruh upaya di atas dimaksudkan untuk mengembalikan keunggulan pendidikan di Sumatera Barat sekaligus mengembalikan keunggulan intelektual masyarakat Sumatera Barat untuk dapat berkiprah secara cemerlang tidak saja di Sumatera Barat tetapi juga di tingkat nasional dan internasional. Harapan ini bukan tanpa dasar karena kita tahu dengan pendekatan peran serta masyarakat dan otonomi pendidikan di tingkat sekolah, keunggulan pendidikan yang pernah ada di Sumatera Barat telah melahirkan pemikir-pemikir yang cemerlang tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi juga dalam bidang agama, filsafat dan ilmu-ilmu humaniora lainnya.

Keunggulan yang dimiliki oleh tokoh-tokoh tersebut tidak lahir dengan sendirinya, tetapi merupakan proses yang terus diperkaya sehingga mewujudkan insan yang kritis terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan kemasyarakatan tetapi senantiasa tawadu'

terhadap Sang Pencipta. Melalui serangkaian kegiatan ini kita berharap para generasi penerus dari Sumatera Barat dapat kembali mendarmabaktikan diri secara penuh dan terhormat di dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan dalam kehidupan global.

Ini adalah tanggung jawab kita karena mereka adalah anak kemenakan kita. Apakah kecerdasan mereka merupakan anugerah bagi anak keturunan kita tersebut akan kita terlantarkan? Mudah-mudahan upaya kita untuk mewujudkan wawasan keunggulan dalam pengembangan pendidikan di Sumatera Barat dapat memberikan suri tauladan yang baik bagi generasi mendatang sehingga dapat diteruskan dari masa ke masa.

Tabel 1

**Human Development Index Indonesia  
Tahun 1996 dan 1999**

No	Province	Life Expectancy Index		Education Index		Purchasing Power Parity Index		HDI		HDI Rank	
		1996	1999	1996	1999	1996	1999	1996	1999	1996	1999
1.	D.I. Aceh	69.0	71.0	75.5	78.1	62.6	34.3	69.4	61.1	9	9
2.	Sumatera Utara	67.8	70.2	79.7	81.5	64	34.7	70.5	62.1	7	7
3.	Sumatera Barat	64.7	67.5	76.5	79.6	66.4	38.2	69.2	61.8	11	8
4.	Riau	69.8	71.3	77.5	80	64.4	37.1	70.6	62.8	6	5
5.	Jambi	67.5	69.3	75.5	77.5	64.8	35.7	69.3	60.8	10	11
6.	Sumatera Selatan	65.2	67.5	73.8	77	65	28.9	68.0	57.8	15	20
7.	Bengkulu	64.7	67	75.6	77.3	64.9	33.6	68.4	59.3	12	16
8.	Lampung	65.8	68.2	73	75.3	63.9	34.9	67.6	59.4	16	15
9.	DKI Jakarta	75.3	76.8	85.6	86.8	67.4	43.6	76.1	69.1	1	1
10.	Jawa Barat	63.2	65.5	73.9	76.5	67.4	40.3	68.2	60.8	13	11
11.	Jawa Tengah	66.3	72.2	66.5	69.39	68.1	40.3	67.0	60.8	17	11
12.	D.I. Yogyakarta	74.8	76.5	68.5	74.5	72.2	45.1	71.8	65.4	2	2
13.	Jawa Timur	64.7	67.5	63.9	67.4	68	40	65.5	58.3	22	18
14.	Bali	71.8	74.2	67	70.3	71.4	42.2	70.1	62.2	8	6
15.	Nusa Tenggara Barat	49.8	54.7	55.6	60.2	64.6	32.2	56.7	49.0	26	26
16.	Nusa Tenggara Timur	62	64.3	64.2	66.8	56.5	31.8	60.9	54.3	24	24
17.	Kalimantan Barat	63.2	65.2	65.1	67.9	62.6	31.1	63.6	54.7	23	23
18.	Kalimantan Tengah	72.2	73.7	77.2	78.9	64.5	28.5	71.3	60.4	5	14
19.	Kalimantan Selatan	58.8	60	73.8	76.4	66.3	37.7	66.3	58.0	19	19
20.	Kalimantan Timur	71.8	73.3	76.2	79.7	66.1	38.8	71.4	63.9	4	3
21.	Sulawesi Utara	69.3	69.3	80.8	81.6	65.3	37.6	71.8	63.7	2	4
22.	Sulawesi Tengah	59.3	62.8	74.8	77.3	65	27.1	66.4	55.7	18	22
23.	Sulawesi Selatan	66.7	72.2	66.5	69.9	64.8	34.2	66.0	58.8	21	17
24.	Sulawesi Tenggara	64.3	66.7	72.2	73.2	62.1	30	66.2	56.6	20	21
25.	Maluku	63.5	70.7	77.8	80.8	63.2	31.5	68.2	61.0	13	10
26.	Irian Jaya	62.8	65.8	56.1	59.9	61.7	31.3	60.2	52.3	25	25
	Indonesia	68.3	56.9				69.0				

Tabel 2

**Human Development Index Sumatera Barat  
Tahun 1996 dan 1999**

No	Province	Life Expectancy Index		Education Index		Purchasing Power Parity Index		H D I		HDI Rank	
		1996	1999	1996	1999	1996	1999	1996	1999	1996	1999
1.	Pesisir Selatan	62.7	65.5	72.7	77.7	62.8	38.8	66.1	60.7	168	126
2.	Solok	56.0	58.7	72.4	76.8	63.5	37.6	64.0	57.7	219	199
3.	Sawahlunto/Sijunjung	56.2	59.0	71.5	76.6	65.8	39.1	64.5	58.2	206	185
4.	Tanah Datar	67.7	70.3	76.4	77.9	63.7	38.9	69.2	62.4	85	82
5.	Padang Pariaman	63.0	65.7	72.5	76.8	66.0	40.3	67.2	60.9	139	118
6.	Agam	67.7	70.3	76.0	78.2	63.7	39.6	69.1	62.7	88	75
7.	Limapuluh Koto	63.5	66.2	76.5	78.2	64.0	38.0	68.0	60.8	118	123
8.	Pasaman	57.3	60.2	72.8	77.3	62.6	36.2	64.2	57.9	213	192
9.	Padang	70.3	73.0	84.6	86.2	67.3	41.1	74.1	66.8	20	24
10.	Solok	66.2	68.8	81.3	84.3	63.5	40.1	70.3	64.4	64	54
11.	Sawah Lunto	74.5	75.2	80.3	82.4	64.4	38.6	73.1	65.4	30	41
12.	Padang Panjang	71.0	73.7	65.1	86.2	64.5	41.6	73.6	67.1	24	15
13.	Bukit Tinggi	74.5	74.7	86.7	87.4	67.1	38.7	76.1	66.9	5	20
14.	Payakumbuh	67.8	69.7	81.9	83.4	64.6	41.0	71.4	64.7	51	50

Tabel 3

**DAFTAR SLTP KLASIFIKASI BAIK SEKALI  
EBTANAS SLTP/MTs TAHUN AJARAN 1997/1998**

No	Nama Sekolah	Total NEM	PROPINSI
1	SLTPN 1 Jeumpa	7.79	Daerah Istimewa Aceh
2	SLTPN 01 Banda Aceh	7.65	Daerah Istimewa Aceh
3	SLTPN 1 Bantul	7.57	Daerah Istimewa Yogyakarta
4	SLTPN 1 Sanden	7.52	Daerah Istimewa Yogyakarta
5	SLTPN 4 Pakem	7.62	Daerah Istimewa Yogyakarta
6	SLTPN 01 Yogyakarta	7.72	Daerah Istimewa Yogyakarta
7	SLTPN 05 Yogyakarta	8.07	Daerah Istimewa Yogyakarta
8	SLTPN 08 Yogyakarta	7.98	Daerah Istimewa Yogyakarta
9	SLTPN 02 Yogyakarta	7.58	Daerah Istimewa Yogyakarta
10	SLTPN 09 Yogyakarta	7.67	Daerah Istimewa Yogyakarta
11	SLTPN 1 Bintauna	7.52	Sulawesi Utara
12	SLTPS Iskandar Muda (PIM)	7.73	Daerah Istimewa Aceh
13	SLTPS Santa Tresia Air	7.71	Riau
14	SLTP Stella Duce 1 YK	7.56	Daerah Istimewa Yogyakarta
15	SLTP Nusantara	7.59	Sulawesi Selatan

Table 4

DAFTAR SLTP KLASIFIKASI BAIK  
EBTANAS SLTP/MTs TAHUN AJARAN 1997/1998

PROPINSI	Klasifikasi Baik			
	Negeri	Swasta	Total	Persentase
Daerah Istimewa Aceh	57	14	71	10.3
Riau	6	2	8	1.2
Sumatera Utara	-	4	4	0.6
<b>Sumatera Barat</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>2.3</b>
Jambi	1	-	1	0.1
Lampung	2	6	8	1.2
DKI Jakarta	-	35	35	5.1
Jawa Barat	2	13	15	2.2
Jawa Tengah	77	12	89	13.0
D I Yogyakarta	75	5	80	11.6
Jawa Timur	35	16	51	7.4
Kalimantan Tengah	6	2	8	1.2
Kalimantan Timur	-	1	1	0.1
Bali	6	-	6	0.9
NTB	1	-	1	0.1
Sulawesi Utara	58	37	95	13.8
Sulawesi Tengah	3	-	3	0.4
Sulawesi Selatan	25	23	48	7.0
Sulawesi Tenggara	48	3	51	7.4
Maluku	52	39	91	13.2
Irian Jaya	4	1	5	0.7
<b>Total</b>	<b>469</b>	<b>218</b>	<b>687</b>	<b>100.0</b>

Tabel 5

Daftar SLTA Jurusan IPA Klasifikasi Baik Sekali  
EBTANAS SLTA/MA Tahun Ajaran 1997/1998

No	Nama Sekolah	Total NEM	PROPINSI
1	SMUN 2 Kuta Baro MB	8.27	Daerah Istimewa Aceh
2	SMUN 1 Yogyakarta	7.57	Daerah Istimewa Yogyakarta
3	SMUN 1 Denpasar	7.53	Bali
4	SMUN 1 Serui	7.94	Irian Jaya
5	SMU Methodist Indonesia	7.54	Sumatera Utara
6	SMU Santa Ursula	7.86	DKI Jakarta
7	SMU Kristen 1	7.86	DKI Jakarta
8	SMU Taruna Nusantara	7.84	Jawa Tengah
9	SMU Plus Palangkaraya	7.84	Kalimantan Tengah
10	SMU KR Eben Haezar Manado	7.52	Sulawesi Utara

Tabel 6

Daftar SLTA Jurusan IPA Klasifikasi Baik  
EBTANAS SLTA/MA Tahun Ajaran 1997/1998

PROPINSI	Klasifikasi Baik			
	Negeri	Swasta	Jumlah	Persentase
Daerah Istimewa Aceh	3	1	4	2.0
Sumatera Utara	-	5	5	2.5
Riau	2	2	4	2.0
Sumatera Barat	7	2	9	4.5
Sumatera Selatan	1	-	1	0.5
Lampung	2	1	3	1.5
Bengkulu	2	-	2	1.0
DKI Jakarta	9	17	26	13.1
Jawa Barat	1	6	7	3.5
Jawa Tengah	12	5	17	8.5
DI Yogyakarta	8	2	10	5.0
Jawa Timur	19	8	27	13.6
Kalimantan Barat	-	1	1	0.5
Kalimantan Tengah	1	2	3	1.5
Kalimantan Timur	-	2	2	1.0
Bali	7	-	7	3.5
NTB	1	-	1	0.5
Sulawesi Utara	24	3	27	13.6
Sulawesi Selatan	25	7	32	16.1
Sulawesi Tengah	-	1	1	0.5
Sulawesi Tenggara	9	-	9	4.5
Maluku	1	-	1	0.5
<b>Total</b>	<b>134</b>	<b>65</b>	<b>199</b>	<b>100.0</b>

Tabel 7

Daftar SLTA Jurusan IPS Klasifikasi Baik Sekali  
EBTANAS SLTA/MA Tahun Ajaran 1997/1998

No	Nama Sekolah	Total NEM	PROPINSI
1	SMU Negeri 78	7.7	DKI Jakarta
2	SMU Negeri 8	7.6	DKI Jakarta
3	SMU Negeri 81	7.6	DKI Jakarta
4	SMUN 1 Magelang	7.5	Jawa Tengah
5	SMUN 3 Yogyakarta	8.0	D I Yogyakarta
6	SMUN 1 Yogyakarta	8.0	D I Yogyakarta
7	SMUN 8 Yogyakarta	7.5	D I Yogyakarta
8	SMUN 3 Denpasar	7.5	Bali
9	SMU Xaverius	7.6	Sumatera Barat
10	SMU Santa Ursula	7.9	DKI Jakarta
11	SMU Kristen 1	7.9	DKI Jakarta
12	SMU PL Van Lith Muntilan	7.7	Jawa Tengah
13	SMU Taruna Nusantara	8.0	Jawa Tengah
14	SMU K.E Haezar Manado	7.5	Sulawesi Utara

Tabel 8

Daftar SLTA Jurusan IPS Klasifikasi Baik  
EBTANAS SLTA/MA Tahun Ajaran 1997/1998

PROPINSI	Klasifikasi Baik			
	Negeri	Swasta	Jumlah	Persentase
Daerah Istimewa Aceh	2	2	4	1.9
Sumatera Utara	-	5	5	2.3
Riau	2	1	3	1.4
<b>Sumatera Barat</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>3.3</b>
Lampung	1	1	2	0.9
DKI Jakarta	15	21	36	16.7
Jawa Barat	5	5	10	4.7
Jawa Tengah	23	6	29	13.5
D I Yogyakarta	14	3	17	7.9
Jawa Timur	22	11	33	15.3
Kalimantan Tengah	1	-	1	0.5
Kalimantan Barat	-	1	1	0.5
Kalimantan Timur	1	1	2	0.9
Bali	6	-	6	2.8
NTB	1	-	1	0.5
Sulawesi Utara	20	14	34	15.8
Sulawesi Selatan	15	6	21	9.8
Sulawesi Tenggara	3	-	3	1.4
<b>Total</b>	<b>137</b>	<b>78</b>	<b>215</b>	<b>100.0</b>

Tabel 9  
 Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP dan SLTA  
 Di Seluruh Indonesia Tahun 1999/2000

Propinsi / Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat I dan Tingkat II	APM SLTP	APM SLTA
<b>INDONESIA</b>	<b>57.1</b>	<b>31.0</b>
<b>KAWASAN BARAT INDONESIA</b>		
<i>Jawa &amp; Bali</i>		
31 DKI Jakarta	69.0	53.1
32 Jawa Barat	55.6	24.9
33 Jawa Tengah	62.3	30.8
34 D.I. Yogyakarta	72.8	53.5
35 Jawa Timur	58.4	34.1
51 Bali	61.7	44.0
<i>Sumatera</i>		
11 D.I. Aceh	61.7	46.3
12 Sumatera Utara	64.4	27.9
<del>13 Sumatera Barat</del>	<del>61.9</del>	<del>43.7</del>
14 Riau	55.1	28.3
15 Jambi	55.1	25.0
16 Sumatera Selatan	52.0	25.2
17 Bengkulu	61.5	26.8
18 Lampung	51.6	21.6
<b>KAWASAN TIMUR INDONESIA</b>		
<i>Kalimantan</i>		
61 Kalimantan Barat	45.2	21.5
62 Kalimantan Tengah	44.9	22.4
63 Kalimantan Selatan	42.2	33.4
64 Kalimantan Timur	57.3	53.3
<i>Sulawesi</i>		
71 Sulawesi Utara	53.7	42.1
72 Sulawesi Tengah	43.4	13.4
73 Sulawesi Selatan	53.9	27.5
74 Sulawesi Tenggara	58.9	26.6
<i>Maluku, Nusa Tenggara, Irian</i>		
52 Nusa Tenggara Barat	54.7	26.8
53 Nusa Tenggara Timur	42.7	23.6
81 Maluku	51.8	41.7
82 Irian Jaya	34.1	23.7

Tabel 10

**Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan  
Di Sumatera Barat Tahun 1996 dan 1999**

No	Kabupaten/Kota		1996		1999		Naik/Turun	
			SD	SLTP	SD	SLTP	SD	SLTP
1.	Agam	% APM	98.91	57.28	90.37	63.36	Turun	Naik
2.	Pasaman	% APM	98.28	52.53	87.29	56.62	Turun	Naik
3.	Solok	% APM	99.02	53.26	89.70	62.11	Turun	Naik
4.	Padang Pariaman	% APM	98.37	56.64	90.94	59.77	Turun	Naik
5.	Pesisir Selatan	% APM	99.15	51.13	85.55	58.95	Turun	Naik
6.	Sawahlunto/Sijunjung	% APM	98.92	55.47	89.80	61.22	Turun	Naik
7.	50 Kota	% APM	98.77	55.70	86.28	68.49	Turun	Naik
8.	Tanah Datar	% APM	98.00	53.72	86.08	59.38	Turun	Naik
9.	Kota Padang	% APM	97.73	74.69	104.28	67.04	Naik	Turun
10.	Kota Bukittinggi	% APM	97.53	83.27	64.80	74.92	Turun	Turun
11.	Padangpanjang	% APM	97.99	116.54	95.46	87.25	Turun	Turun
12.	Sawahlunto	% APM	97.85	80.32	82.10	62.80	Turun	Turun
13.	Kota Solok	% APM	99.47	114.70	102.31	83.06	Naik	Turun
14.	Kota Payakumbuh	% APM	98.89	82.53	84.92	85.96	Turun	Naik

\* APM = Angka Partisipasi Murni, menggambarkan persentase anak yang bersekolah dibandingkan dengan anak usia sekolah atau yang seharusnya sekolah

Tabel 11

**Jumlah Siswa SLTP dan SLTA yang Putus Sekolah  
Di Sumatera Barat Tahun 1996 dan 1999**

No	Kabupaten/Kota	1996			1999		
		SMP	SMU	SMK	SMP	SMU	SMK
1.	Agam	189	109	7	728	237	37
2.	Pasaman	547	193	0	358	214	0
3.	50 Kota	320	141	0	480	159	0
4.	Kab. Solok	250	134	0	872	270	162
5.	Padang Pariaman	527	177	14	706	130	3
6.	Pesisir Selatan	321	146	16	250	138	90
7.	Tanah Datar	242	138	31	193	77	21
8.	Sawahlunto Sijunjung	297	92	25	431	59	0
9.	Bukittinggi	42	179	114	46	24	104
10.	Kota Padang	261	316	134	472	258	331
11.	Padangpanjang	83	29	18	39	8	98
12.	Sawahlunto	13	61	26	33	20	60
13.	Kota Solok	46	52	0	75	35	105
14.	Kota Payakumbuh	119	87	13	179	52	249
	<b>Sumatera Barat</b>	<b>3.266</b>	<b>1.853</b>	<b>398</b>	<b>4.862</b>	<b>1.681</b>	<b>1.260</b>

Tabel 12

Data Tingkat Kerusakan SD/MI, Negeri dan Swasta  
Di Seluruh Indonesia Tahun 1997

Propinsi / Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat I dan Tingkat II	Jumlah SD/MI	Kondisi Gedung SD/MI					
		Rusak Total		Rusak Berat		Baik	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
<b>INDONESIA</b>	<b>173,428</b>	<b>19,171</b>	<b>11.1</b>	<b>42,273</b>	<b>24.4</b>	<b>51,079</b>	<b>29.5</b>
<b>KAWASAN BARAT INDONESIA</b>	<b>132,653</b>	<b>12,639</b>	<b>9.5</b>	<b>31,900</b>	<b>24.0</b>	<b>40,734</b>	<b>30.7</b>
<i>Jawa &amp; Bali</i>	<i>94,606</i>	<i>8,898</i>	<i>9.4</i>	<i>22,766</i>	<i>24.1</i>	<i>29,859</i>	<i>31.6</i>
1 DKI Jakarta	3,737	135	3.6	368	9.8	2,415	64.6
2 Jawa Barat	30,454	4,741	15.6	10,008	32.9	6,075	19.9
3 Jawa Tengah	25,575	1,820	7.1	5,600	21.9	8,456	33.1
4 D.I. Yogyakarta	2,520	112	4.4	467	18.5	897	35.6
5 Jawa Timur	29,596	1,854	6.3	5,700	19.3	11,135	37.6
6 Bali	2,724	236	8.7	623	22.9	881	32.3
<i>Sumatera</i>	<i>38,047</i>	<i>3,741</i>	<i>9.8</i>	<i>9,134</i>	<i>24.0</i>	<i>10,875</i>	<i>28.6</i>
1 D.I. Aceh	3,857	397	10.3	865	22.4	1,042	27.0
2 Sumatera Utara	9,934	1,023	10.3	2,538	25.5	2,437	24.5
<b>3 Sumatera Barat</b>	<b>4,399</b>	<b>273</b>	<b>6.2</b>	<b>872</b>	<b>19.8</b>	<b>1,325</b>	<b>30.1</b>
4 Riau	3,848	457	11.9	960	24.9	1,172	30.5
5 Jambi	3,378	324	9.6	804	23.8	1,130	33.5
6 Sumatera Selatan	6,312	536	8.5	1,269	20.1	2,251	35.7
7 Bengkulu	1,537	202	13.1	422	27.5	369	24.0
8 Lampung	4,782	529	11.1	1,404	29.4	1,149	24.0
<b>KAWASAN TIMUR INDONESIA</b>	<b>40,775</b>	<b>6,532</b>	<b>16.0</b>	<b>10,373</b>	<b>25.4</b>	<b>10,345</b>	<b>25.4</b>
<i>Kalimantan</i>	<i>12,264</i>	<i>2,040</i>	<i>16.6</i>	<i>3,272</i>	<i>26.7</i>	<i>2,810</i>	<i>22.9</i>
1 Kalimantan Barat	3,860	738	19.1	996	25.8	872	22.6
2 Kalimantan Tengah	2,652	644	24.3	717	27.0	556	21.0
3 Kalimantan Selatan	3,578	386	10.8	1,020	28.5	793	22.2
4 Kalimantan Timur	2,174	272	12.5	539	24.8	589	27.1
<i>Sulawesi</i>	<i>15,752</i>	<i>1,883</i>	<i>12.0</i>	<i>3,918</i>	<i>24.9</i>	<i>4,266</i>	<i>27.1</i>
1 Sulawesi Utara	2,997	198	6.6	580	19.4	1,126	37.6
2 Sulawesi Tengah	2,864	376	13.1	767	26.8	688	24.0
3 Sulawesi Selatan	8,046	972	12.1	1,991	24.7	2,148	26.7
4 Sulawesi Tenggara	1,845	337	18.3	580	31.4	304	16.5
<i>Maluku, Nusa Tenggara, Irian</i>	<i>12,759</i>	<i>2,609</i>	<i>20.4</i>	<i>3,183</i>	<i>24.9</i>	<i>3,269</i>	<i>25.6</i>
2 Nusa Tenggara Barat	3,350	224	6.7	621	18.5	1,315	39.3
3 Nusa Tenggara Timur	4,045	917	22.7	1,207	29.8	762	18.8
1 Maluku	2,539	687	27.1	695	27.4	457	18.0
2 Irian Jaya	2,043	607	29.7	471	23.1	544	26.6

Tabel 13

Rasio Siswa per Guru Tingkat SD, SLTP dan SLTA  
Tahun 1999/2000

Propinsi / Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat I dan Tingkat II	Rasio Siswa per Guru		
	SLTA	SLTP	SD
<b>INDONESIA</b>	14	17	22
<b>KAWASAN BARAT INDONESIA</b>			
<i>Jawa &amp; Bali</i>			
31 DKI Jakarta	14	15	23
32 Jawa Barat	15	21	30
33 Jawa Tengah	15	20	22
34 D.I. Yogyakarta	11	13	16
35 Jawa Timur	14	17	19
51 Bali	12	13	15
<i>Sumatera</i>			
11 D.I. Aceh	12	14	23
12 Sumatera Utara	13	17	24
<b>13 Sumatera Barat</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>21</b>
14 Riau	15	17	24
15 Jambi	14	15	20
16 Sumatera Selatan	13	17	23
17 Bengkulu	14	17	19
18 Lampung	12	16	23
<b>KAWASAN TIMUR INDONESIA</b>			
<i>Kalimantan</i>			
61 Kalimantan Barat	13	18	22
62 Kalimantan Tengah	12	15	15
63 Kalimantan Selatan	13	14	17
64 Kalimantan Timur	14	17	20
<i>Sulawesi</i>			
71 Sulawesi Utara	13	13	15
72 Sulawesi Tengah	11	13	19
73 Sulawesi Selatan	13	16	20
74 Sulawesi Tenggara	17	19	22
<i>Maluku, Nusa Tenggara, Irian</i>			
52 Nusa Tenggara Barat	14	17	26
53 Nusa Tenggara Timur	15	16	23
81 Maluku	15	17	21
82 Irian Jaya	14	15	20

Tabel 14  
Rasio Kelas per Sekolah Tingkat SD, SLTP dan SLTA  
Tahun 1999/2000

Propinsi / Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat I dan Tingkat II	Rasio Kelas per Sekolah		
	SLTA	SLTP	SD
<b>INDONESIA</b>	<b>10.2</b>	<b>9.1</b>	<b>6.8</b>
<b>KAWASAN BARAT INDONESIA</b>			
<i>Jawa &amp; Bali</i>			
31 DKI Jakarta	11.7	9.2	8.0
32 Jawa Barat	12.9	11.6	7.4
33 Jawa Tengah	11.4	10.3	6.3
34 D.I. Yogyakarta	10.5	10.3	6.3
35 Jawa Timur	9.7	9.7	6.6
51 Bali	11.3	10.5	6.1
<i>Sumatera</i>			
11 D.I. Aceh	9.1	8.2	6.7
12 Sumatera Utara	8.6	8.3	7.0
<b>13 Sumatera Barat</b>	<b>11.9</b>	<b>11.4</b>	<b>6.5</b>
14 Riau	10.5	8.1	7.3
15 Jambi	8.7	7.3	7.2
16 Sumatera Selatan	9.2	9.0	7.0
17 Bengkulu	9.8	7.9	6.5
18 Lampung	8.1	8.0	7.4
<b>KAWASAN TIMUR INDONESIA</b>			
<i>Kalimantan</i>			
61 Kalimantan Barat	7.9	6.3	6.6
62 Kalimantan Tengah	6.6	4.9	5.8
63 Kalimantan Selatan	9.8	7.5	6.3
64 Kalimantan Timur	8.6	7.8	7.2
<i>Sulawesi</i>			
71 Sulawesi Utara	7.3	6.3	6.3
72 Sulawesi Tengah	8.4	6.4	6.1
73 Sulawesi Selatan	9.4	8.6	6.8
74 Sulawesi Tenggara	11.0	8.6	6.7
<i>Maluku, Nusa Tenggara, Irian</i>			
52 Nusa Tenggara Barat	11.5	11.9	6.6
53 Nusa Tenggara Timur	9.4	6.3	6.1
81 Maluku	9.1	6.5	6.5
82 Irian Jaya	10.0	6.3	6.8

TABEL 15

Data Jumlah SLTP Negeri dan Swasta  
Di Seluruh Indonesia Tahun 1999/2000

Propinsi / Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat I dan Tingkat II	SLTP Negeri		SLTP Swasta	
	Jumlah	%	Jumlah	%
<b>INDONESIA</b>	<b>10,495</b>	<b>50.3</b>	<b>10,371</b>	<b>49.7</b>
<b>KAWASAN BARAT INDONESIA</b>				
<i>Jawa &amp; Bali</i>				
31 DKI Jakarta	282	25.9	804	74.0
32 Jawa Barat	1,253	48.2	1,349	51.8
33 Jawa Tengah	1,366	50.2	1,357	49.8
34 D.I. Yogyakarta	201	42.4	273	57.6
35 Jawa Timur	1,281	42.9	1,706	57.1
51 Bali	166	49.7	168	50.3
<i>Sumatera</i>				
11 D.I. Aceh	405	79.6	104	20.4
12 Sumatera Utara	651	38.2	1,053	61.8
<b>13 Sumatera Barat</b>	<b>371</b>	<b>83.2</b>	<b>75</b>	<b>16.8</b>
14 Riau	311	61.6	194	38.4
15 Jambi	222	70.9	91	29.1
16 Sumatera Selatan	421	46.0	494	54.0
17 Bengkulu	162	80.2	40	19.8
18 Lampung	295	33.0	599	67.0
<b>KAWASAN TIMUR INDONESIA</b>				
<i>Kalimantan</i>				
61 Kalimantan Barat	255	46.7	291	53.3
62 Kalimantan Tengah	213	65.5	112	34.5
63 Kalimantan Selatan	252	80.8	60	19.2
64 Kalimantan Timur	195	58.6	138	41.4
<i>Sulawesi</i>				
71 Sulawesi Utara	273	49.3	281	50.7
72 Sulawesi Tengah	202	65.4	107	34.6
73 Sulawesi Selatan	611	64.7	334	35.3
74 Sulawesi Tenggara	206	82.7	43	17.3
<i>Maluku, Nusa Tenggara, Irian</i>				
52 Nusa Tenggara Barat	213	80.4	52	19.6
53 Nusa Tenggara Timur	236	45.5	319	57.5
81 Maluku	219	48.6	232	51.4
82 Irian Jaya	233	71.0	95	29.0

TABEL 16

Data Jumlah SLTA Negeri dan Swasta  
Di Seluruh Indonesia Tahun 1999/2000

Propinsi / Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat I dan Tingkat II	SLTA Negeri		SLTA Swasta	
	Jumlah	%	Jumlah	%
<b>INDONESIA</b>	<b>3.611</b>	<b>29.9</b>	<b>8.458</b>	<b>70.1</b>
<b>KAWASAN BARAT INDONESIA</b>				
<i>Jawa &amp; Bali</i>				
31 DKI Jakarta	174	16.9	854	83.1
32 Jawa Barat	395	28.1	1,013	72.0
33 Jawa Tengah	400	26.1	1,135	73.9
34 D.I. Yogyakarta	95	27.0	257	73.0
35 Jawa Timur	418	22.1	1,474	77.9
51 Bali	76	32.3	159	67.7
<i>Sumatera</i>				
11 D.I. Aceh	169	66.8	84	33.2
12 Sumatera Utara	234	19.9	943	80.1
<b>13 Sumatera Barat</b>	<b>151</b>	<b>48.9</b>	<b>158</b>	<b>51.1</b>
14 Riau	109	46.6	125	53.4
15 Jambi	75	46.0	88	54.0
16 Sumatera Selatan	122	25.4	358	74.6
17 Bengkulu	61	53.5	53	46.5
18 Lampung	100	22.4	347	77.6
<b>KAWASAN TIMUR INDONESIA</b>				
<i>Kalimantan</i>				
61 Kalimantan Barat	81	33.5	161	66.5
62 Kalimantan Tengah	62	43.4	81	56.6
63 Kalimantan Selatan	78	56.9	59	43.1
64 Kalimantan Timur	71	34.0	138	66.0
<i>Sulawesi</i>				
71 Sulawesi Utara	107	39.8	162	60.2
72 Sulawesi Tengah	72	52.2	66	47.8
73 Sulawesi Selatan	208	40.4	307	59.6
74 Sulawesi Tenggara	63	59.4	43	40.6
<i>Maluku, Nusa Tenggara, Irian</i>				
52 Nusa Tenggara Barat	81	52.3	74	47.7
53 Nusa Tenggara Timur	69	32.7	142	67.3
81 Maluku	82	45.1	100	55.0
82 Irian Jaya	58	43.0	77	57.0



Tabel 17  
 Persentase APBD Tingkat I  
 Sektor Pendidikan Tahun 1997/1998

Propinsi / Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat I dan Tingkat II	APBD Dikbudnas, Kepercayaan thdp TYME, Pemuda dan Olah Raga (%)
<b>INDONESIA</b>	<b>6.4</b>
<b>KAWASAN BARAT INDONESIA</b>	<b>6.9</b>
<i>Jawa &amp; Bali</i>	
31 DKI Jakarta	6.7
32 Jawa Barat	7.1
33 Jawa Tengah	6.1
34 D.I. Yogyakarta	9.0
35 Jawa Timur	7.1
51 Bali	5.5
<i>Sumatera</i>	
11 D.I. Aceh	27.1
12 Sumatera Utara	3.1
<del>13 Sumatera Barat</del>	<del>5.2</del>
14 Riau	2.5
15 Jambi	5.0
16 Sumatera Selatan	5.2
17 Bengkulu	3.1
18 Lampung	9.5
<b>KAWASAN TIMUR INDONESIA</b>	<b>4.9</b>
<i>Kalimantan</i>	
61 Kalimantan Barat	8.0
62 Kalimantan Tengah	6.8
63 Kalimantan Selatan	4.2
64 Kalimantan Timur	6.2
<i>Sulawesi</i>	
71 Sulawesi Utara	6.1
72 Sulawesi Tengah	2.0
73 Sulawesi Selatan	3.0
74 Sulawesi Tenggara	2.3
<i>Maluku, Nusa Tenggara, Irian</i>	
52 Nusa Tenggara Barat	2.2
53 Nusa Tenggara Timur	2.5
81 Maluku	4.5
82 Irian Jaya	6.1

**POKOK-POKOK PIKIRAN KEBIJAKAN REAKTUALISASI  
PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA  
DI SUMATERA BARAT**

**Prof. Dr. JURNALIS UDDIN, PAK**  
*Ketua Bidang SDM Gebu Minang Pusat*

**PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA SUMATERA BARAT  
SELAMA ORDE BARU**

- . SENTRALISASI YANG SANGAT KENTAL
- . UNIFORMITAS DI SELURUH INDONESIA TANPA PEDULI DENGAN POTENSI DAN SOSIOKULTURAL DAERAH
- . INOVASI DAN KREASI DIKEBIRI
- . *TEXTBOOK THINKING ORIENTED*
- . *TEACHER CENTERED LEARNING* SANGAT DOMINAN
- . HANYA MENGHASILKAN PEMBELO-PEMBELO YANG ULUNG YANG SIAP MENYETUJUI APA SAJA YANG DATANG DARI ATAS
- . OUTPUT DAN OUTCOME YANG SERAGAM DI SELURUH INDONESIA
- . JADI BIROKRAT DAN MILITER SANGAT DIDAMBAKAN OLEH SETIAP LULUSAN

**POKOK-POKOK PIKIRAN REAKTUALISASI PEMBANGUNAN  
SUMBER DAYA MANUSIA SUMATERA BARAT**

- . OTONOMI DAERAH MEMBUKA PELUANG INOVASI SISTEM PENDIDIKAN DI SUMATERA BARAT
- . INOVASI SISTEM PENDIDIKAN HARUS DISUSUN DEMIKIAN RUPA SEHINGGA OUTPUT DAN OUTCOME HARUS LEBIH UNGGUL DARI PROPINSI LAIN
- . INOVASI SISTEM PENDIDIKAN DI SUMATERA BARAT TIDAK PERLU MEROMBAK TOTAL SISTEM YANG ADA KARENA AKAN SANGAT MAHAL BIAYANYA
- . SISTEM PENDIDIKAN DI SUMATERA BARAT HARUS BERLANDASKAN :  
"ADAT BASANDI SYARA' DAN SYARA' BASANDI KITABULLAH"

**KARAKTERISTIK INDUSTRI PENDIDIKAN**

- . PENDIDIKAN TIDAK LAGI SEKEDAR PROSES BELAJAR MENGAJAR YANG SADAR TUJUAN

- . PENDIDIKAN TIDAK LAGI HANYA SEKEDAR USAHA SOSIAL
- . PENDIDIKAN TIDAK LAGI HANYA UPAYA MENCERDASKAN BANGSA
- . PENDIDIKAN TIDAK LAGI HANYA SEKEDAR MENGEJAR KETERTINGGALAN
- . PENDIDIKAN TIDAK LAGI HANYA SEKEDAR MEMENUHI KEBUTUHAN DUNIA USAHA SETEMPAT
- . PENDIDIKAN TIDAK LAGI HANYA SEKEDAR MENGATASI KESENJANGAN LULUSAN TINGKAT PENDIDIKAN KETINGKAT YANG LEBIH TINGGI
- . *PROFIT ORIENTED* SEHINGGA MAMPU MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN INSTITUSINYA TANPA TERGANTUNG PADA ORANG / INSTITUSI LAIN
- . MAMPU MENGIDENTIFIKASI SEGMENT PASAR YANG SESUAI DENGAN PRODUK YANG AKAN DIJUALNYA
- . MAMPU MENCIPTAKAN SEGMENT PASAR SENDIRI
- . SELALU BERINOVASI SEHINGGA MAMPU MEMPRODUKSI PRODUK-PRODUK BARU YANG DIBUTUHKAN PASAR
- . SASARAN PASAR MELEWATI BATAS-BATAS PROPINSI DAN NEGARA
- . OUTPUTNYA DIBUTUHKAN OLEH DUNIA USAHA SAMPAI KELUAR BATAS PROPINSI DAN NEGARA

#### **PRASYARAT INDUSTRI PENDIDIKAN DI SUMATERA BARAT**

- . INDUSTRI PENDIDIKAN DAPAT DIMULAI PADA PENDIDIKAN TINGGI
- . ADA KEBULATAN PANDANGAN ANTAR PEMDA, DPRD, PERGURUAN TINGGI DAN MASYARAKAT
- . SEGERA MENSWASTAKAN PERGURUAN TINGGI NEGERI DI SUMATERA BARAT MENJADI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DALAM BENTUK PERSEROAN TERBATAS
- . MELALUI PERDA, PEMDA DAN DPRD MENGALOKASIKAN DANA KHUSUS UNTUK Mendukung Dikembangkannya Pendidikan Menjadi Sebuah Industri
- . AKREDITASI INTERNASIONAL PROGRAM STUDI
- . BAHASA INGGRIS HARUS MENJADI BAHASA IBU KEDUA
- . JIKA MUNGKIN BAHASA ARAB SBG BHS IBU KE 3
- . LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI SUMBAR YANG TELAH PUNYA *TRACK RECORD* MENONJOL : UNAND, UNP, IAIN IMAM BONJOL, UNIV. BUNG

HATTA DAPAT MENJADI MOTOR PENGGERAK DIMULAINYA INDUSTRI PENDIDIKAN

- MASING-MASING PTN/PTS YANG BERPOTENSI HARUS MEMULAI DENGAN *SELF ASSESMENT*, STUDI KELAYAKAN YANG KOMPREHENSIF, KEJELASAN TAHAPAN-TAHAPAN DAN ANGGARAN BIAYA SERTA SUMBER DANA YANG DIPERLUKAN

#### TAHAPAN MENUJU INDUSTRI PENDIDIKAN DI SUMATERA BARAT

- TAHAPAN AWAL MENUJU KESEPAKATAN BULAT PEMDA/DPRD/PT/MASYARAKAT
- DIMULAI DENGAN PROGRAM STUDI :
  - TELAH DIAKREDITASI BAN-PT DAN BERPERINGKAT A
  - MEMPUNYAI FASILITAS FISIK TERBAIK
  - TELAH PUNYA SEJUMLAH GURU BESAR, DOKTOR DAN MAGISTER
  - TELAH PUNYA REPUTASI NASIONAL DIBIDANG PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
  - DEMAND-NYA DIMASA DEPAN TINGGI
- UNTUK MEMPERCEPAT, SESEGERA MUNGKIN MENGADAKAN KERJASAMA DENGAN DUNIA USAHA /PT DALAM DAN LUAR NEGERI
- BISA JUGA MULAI DENGAN *FRANCHISING*

#### INDUSTRI PENDIDIKAN DI SUMBAR : MUNGKINKAH ?

#### POKOK-POKOK PIKIRAN KEBIJAKAN REAKTUALISASI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DI SUMATERA BARAT

- SEKOLAH HIBRID HARUS SEGERA DIADOPTSI PADA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
- BAHASA INGGERIS HARUS MENJADI BAHASA IBU KEDUA
- (JIKA MUNGKIN) BAHASA ARAB BAHASA IBU KETIGA
- TEACHER CENTERED LEARNING* HARUS DIUBAH MENJADI *STUDENT CENTERED LEARNING*
- ADAT MINANG HARUS MENJADI MATA AJARAN WAJIB PADA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
- SETIAP PTN/PTS HARUS MEMPUNYAI RPOGRAM STUDI UNGGULAN